

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang menjadi salah satu ukuran bagi setiap keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Seiring perkembangan di Indonesia tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap otonomi daerah menjadi syarat dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangan yang didasarkan pada perencanaan. Dalam bentuk pertanggungjawaban tersebut, diadakannya sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sehingga sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintahan di Indonesia telah menetapkan standar akuntansi sebagai pedoman dalam pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar akuntansi tersebut telah dirancang dengan rumusan secara *detail* mengenai komponen-komponen dalam standar akuntansi. Penjelasan tersebut dinamakan standar akuntansi sektor publik, biasanya dalam pemerintahan dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Dengan kaidah yang diterapkan SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah dapat disajikan secara relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami sebagai pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan dapat dipahami sesuai kebutuhan para pemakai. Menurut Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa “Informasi akan bermanfaat apabila suatu informasi dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai”.

Standar akuntansi tersebut diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut menggunakan basis akrual dengan komponen yang terdapat didalamnya yaitu

pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan pendanaan. Sedangkan upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju akrual hingga basis akrual yang telah memiliki dasar hukum.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggarannya adalah penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan sarana untuk menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Oleh karena itu peran pemerintah harus meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang menyajikan informasi jujur, valid, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu informasi laporan keuangan yang berkualitas akan menambah rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan adanya berbagai skandal keuangan yang terjadi (Linda et, al, 2016).

Aspek lain yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya penyusunan laporan keuangan adalah adanya penerapan teknologi informasi. Peran penerapan TI pada kondisi saat ini suatu hal yang tidak bisa dihindari oleh berbagai instansi, karena memerlukan informasi yang efektif dan efisien yang menjadi kebutuhan semua kalangan pengguna. Seperti diketahui bahwa anggaran dana desa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa tentu harus diikuti dengan penerapan TI dalam pengelolaan keuangan (Darwanis et, al, 2017).

Dikutip oleh berita di Kabupaten Jember “Permasalahan terkait beban penyusutan terhadap penyajian dana BOS dan dana lainnya diluar APBD pemerintah Kab. Jember menekankan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual lebih cepat untuk dipahami sehingga tidak terjadi permasalahan lagi”. Oleh karena itu pemerintah perlu mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dalam membangun jaringan serta membantu pengelolaan data dan informasi sehingga dapat meningkatkan pembuatan laporan keuangan. Humas dalam instansi pemerintah akan selalu dituntut untuk menghadapi perubahan dilingkungannya

yang terjadi sangat cepat di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi informasi (Risal,2016).

Kabupaten Jember memerlukan TI sebagai pendukung proses penyusunan laporan keuangan guna keterandalan juga ketepatanwaktuan. Peran teknologi merupakan perbuatan memakai seperangkat alat yang bisa membantu menghasilkan, menyimpan dan menyampaikan sebuah informasi. Kewajiban memanfaatkan sebuah alat teknologi oleh pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah wajib untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi untuk menambah kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga bisa menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan.

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, penelitian mengacu pada Umar Sako dan Felmi D. Lantowa Januari (2018), I Kadek, I.S. & I.G.A Suaryana (2018), dimana pada ketiga penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni yang pertama, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan pada proses pembuatan laporan keuangan daerah. Kedua, penerapan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan daerah.. Oleh sebab itu penyusun dapat mengkaji lebih dalam perbedaan penelitian yang sudah ada dengan *reality* (nyata) terhadap kondisi lapangan di Kabupaten Jember.

Pada penelitian ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember bagi pengalaman pegawai yang baru dalam mengenal akuntansi terkadang terdapat ketidakpahaman sistematika penulisan baik pencatatan maupun menginput data laporan keuangan. Pentingnya pelatihan maupun pendidikan tentang pemahaman akuntansi sehingga dalam penyusunan laporan pegawai memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik. Semakin tinggi kualitas pemahaman akuntansi maka semakin baik juga laporan keuangan yang dihasilkan sehingga penelitian ini ingin menguji “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

1. Bagi penyusun dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, kompetensi staf akuntansi dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Bagi instansi dapat mengetahui seberapa pentingnya penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
3. Bagi akademik dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi para mahasiswa.